

Pengaruh PAD, DAU, DAN DAK Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Semarang

Satmaka Srasa Saswatata

satmaka30@gmail.com

Parju

parju@untagsmg.ac.id

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kota Semarang selama tahun 2015-2019. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari laporan realisasi bulanan PAD, DAU, DAK, DAN IPM, sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 60 data. Penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data dengan metode dokumentasi dengan sifat datanya adalah data kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia.

Kata Kunci : PAD, DAU, DAK, IPM

Abstract

This study aimed to examine Regional Original Income (ROI), General Allocation Funds (GAF), and Special Allocation Funds (SAF) effected on the Human Development Index (HDI) in Semarang City during 2015-2019. The population of his study consisted of monthly realization reports of ROI, GAF, SAF, And HDI, the sample obtained was 60 data. This study used the method of data collection with the documentation method with the nature of the data was quantitative data. The analysis technique used in this research was multiple linear regression. The results of the study showed that the Regional Original Revenue (ROI), the General Allocation Fund (GAF), and the Special Allocation Fund (SAF) had a positive and significant effect on the quality of human development.

Key Word : *ROI, GAF, SAF, HDI*

1. Pendahuluan

Kota Semarang yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 372,8 KM persegi, serta pusat ekonomi di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki banyak industri yang membangun pabrik di Kota Semarang dan sekitarnya sehingga Kota Semarang mempunyai daya tarik pendatang untuk bekerja di Kota Semarang (Pungky, 2011). Dengan bertambahnya pendatang yang masuk di Kota Semarang berdampak kepada kepadatan Kota Semarang sehingga pemerintah kota melakukan pembangunan sarana prasarana, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dengan cepat agar dapat memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik terhadap masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf, dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai *purcashing power parity index* (PPP) (Novarianti, 2016).

Otonomi daerah dapat mewujudkan pembangunan yang lebih berhasil sehingga salah satu indikator IPM, bahkan kemunculan desentralisasi fiskal di Indonesia sangat dekat dengan isu-isu politik dan kekhawatiran atas disintegrasi nasional. Bagi negara-negara berkembang, desentralisasi fiskal diyakini menjadi solusi untuk semua jenis masalah ekonomi dan politik yang dihadapi yang dapat di

lihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu tujuan utama pemerintah dalam mengelola PAD yang maksimal adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber sumber lainnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga akan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

PAD salah satu aspek yang sangat krusial dalam desentralisasi (otonomi daerah) dilihat dari desentralisasi fiskal, dimana desentralisasi fiskal mensyaratkan bahwa setiap kewenangan yang diberikan kepada daerah harus disertai dengan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan beban kewenangan tersebut. Dengan kata lain, pemerintah pusat berkewajiban untuk menjamin sumber keuangan atas pendelegasian tugas dan wewenang dari pusat ke daerah. Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dana perimbangan yang dimaksud terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan tersebut bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah (*horizontal imbalance*) (Novarianti, 2016)

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Dana Alokasi Umum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. DAU suatu Daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Pemberian DAU kepada pemda merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemda. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemda, dan pemda secara leluasa dapat menggunakan DAU apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga akan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup lebih panjang, meningkatkan kualitas pendidikan dan standard kehidupan masyarakat sehingga akan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). (Darwanto dan Yustikasari, 2007)

Selain faktor PAD dan DAU, faktor yang dapat mempengaruhi IPM adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menjelaskan bahwa DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk menjalankan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di kabupaten/kota. DAK sepenuhnya digunakan untuk belanja modal untuk peningkatan fasilitas publik dengan kata lain tidak ada bagian DAK yang digunakan untuk biaya operasional pembangunan seperti biaya perjalanan dinas dan sebagainya. Dengan meningkatnya DAK, maka akan dapat meningkatkan IPM.

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh DAU terhadap IPM pernah dilakukan oleh Santi (2019), Putra dan Ulupui (2015), Novarianti (2016) yang menghasilkan penelitian DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadhly (2016) dan Harahap (2017) yang menghasilkan penelitian DAU tidak berpengaruh positive signifikan

terhadap IPM. Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh DAK terhadap IPM pernah dilakukan oleh Putra dan Ulupui (2015) serta Fadhy (2016) yang menghasilkan penelitian DAK berpengaruh positif terhadap IPM. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novianti (2016), Harahap (2017), Santi (2019) yang menghasilkan penelitian DAK tidak berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Berdasarkan hasil penelitian yang berbeda, maka akan dilakukan penelitian bertujuan mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Semarang Periode 2015-2019

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah (Yusuf, 2014). Sumber-Sumber pendapatan asli daerah menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu:

1. Hasil pajak daerah Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.
2. Hasil retribusi daerah Pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas.

Tujuan utama pemerintah dalam mengelola PAD yang maksimal adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber sumber lainnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga akan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh PAD terhadap IPM pernah dilakukan oleh Putra dan Ulupui (2015), Novianti (2016) serta Santi (2019) yang menghasilkan penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap IPM. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis penelitian H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). DAU adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka desentralisasi. Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menjelaskan bahwa DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Pemberian DAU kepada pemda merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemda. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemda, dan pemda secara leluasa dapat menggunakan DAU apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga akan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup lebih panjang, meningkatkan kualitas pendidikan dan standard kehidupan masyarakat sehingga akan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh DAU terhadap IPM pernah dilakukan oleh Putra dan Ulupui (2015), Novianti (2016), Santi (2019) yang menghasilkan penelitian DAU berpengaruh positif terhadap IPM. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis penelitian, H2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.3. Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang (Ardhani, 2011). Pemanfaatan dan penggunaan DAK menjadi faktor penting dalam program pembangunan daerah (Usman, dkk, 2008). Jika DAK dapat dikelola dengan baik, dapat memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan mengurangi kerusakan infrastruktur.

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DAK sepenuhnya digunakan untuk belanja modal untuk peningkatan fasilitas publik dengan kata lain tidak ada bagian DAK yang digunakan untuk biaya operasional pembangunan seperti biaya perjalanan dinas dan sebagainya, dengan meningkatkan DAK, maka akan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh DAK terhadap IPM pernah dilakukan oleh Putra dan Ulupui (2015) serta Fadhly (2016) yang menghasilkan penelitian DAK berpengaruh positif terhadap IPM. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis penelitian H3 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan latar belakang masalah, review literatur dan Review jurnal yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini akan melakukan pengujian secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Kerangka model dalam penelitian ini seperti pada Gambar 1.

3. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi PAD, DAU, DAK dan IPM Pemerintah Daerah Kota Semarang yang disajikan dalam bentuk laporan bulanan. Sampel dalam penelitian ini laporan bulanan realisasi PAD, DAU, DAK dan IPM Pemerintah Daerah Kota Semarang tahun 2015-2019 yang berjumlah 60 sampel.

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi dengan mempelajari dokumen – dokumen atau data yang dibutuhkan, dilanjutkan dengan pencatatan dan penghitungan dengan cara menghimpun informasi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan data yang relevan. Sumber dan penggunaannya dengan data statistik yang didapat dari Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. Sifat datanya adalah data kuantitatif yaitu data yang berupa angka angka, dan bersifat obyektif data eksternal yaitu data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berupa laporan realisasi PAD, DAU, DAK dan IPM Pemerintah Daerah Kota Semarang tahun 2015 – 2019.

Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen dengan skala pengukuran atau rasio dalam suatu persamaan linier, dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda (Ghozali, 2016). Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

X1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2 : Dana Alokasi Umum (DAU) X3

X3 : Dana Alokasi Khusus (DAK)

α : Konstanta $\beta_1 \dots \beta_3$: Koefisien regresi

e : *Error*

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

Analisis diskriptif data penelitian dapat dilihat pada statistik deskriptif penelitian pada Tabel 1 dalam lampiran terlihat bahwa jumlah data penelitian 60. Untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan memiliki rata-rata (*mean*) positif yaitu Rp. 139.545.198.862,62. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) minimum sebesar Rp. 62.064.188.630,00 pada bulan Januari tahun 2015. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) maximum Rp. 342.121.300.130,00 pada bulan Desember tahun 2017. Untuk standar deviasi 60.094.754.161,898 menunjukkan nilai

sebaran dari setiap sampel positif dan perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antar sampel penelitian yang relatif jauh.

Untuk variabel Dana Alokasi Umum (DAU) secara keseluruhan memiliki rata-rata (*mean*) positif yaitu Rp. 100.618.106.250,00. Hal ini menunjukkan 60 sampel cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut diakibatkan terjadinya kenaikan pos dana transfer dari pemerintah pusat untuk dana pelayanan masyarakat. Untuk Dana Alokasi Umum (DAU) minimum sebesar Rp. 0 pada bulan Desember tahun 2015, Desember 2017, Desember 2018 serta Mei 2019. Untuk Dana Alokasi Umum (DAU) maximum Rp. 204.325.456.000,00 pada bulan Juni tahun 2019. Untuk standar deviasi 43.929.288.200,201 menunjukkan nilai sebaran dari setiap sampel positif dan perbedaan Dana Alokasi Umum (DAU) antar sampel penelitian yang relatif jauh.

Untuk variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) secara keseluruhan memiliki rata-rata (*mean*) positif yaitu Rp. 20.054.382.463,65. Hal ini menunjukkan 60 sampel cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut diakibatkan terjadinya kenaikan pos transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional. Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) minimum sebesar Rp. 0 pada bulan Januari, Februari, April, Juni, Agustus dan Oktober tahun 2015, bulan September tahun 2016, bulan Januari, Februari, Juni dan Agustus tahun 2017, bulan Januari dan April 2018, bulan Januari, Februari dan Mei tahun 2019. Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) maximum Rp. 95.495.829.706,00 pada bulan Maret tahun 2018. Untuk standar deviasi 25.666.688.803,234 menunjukkan nilai sebaran dari setiap sampel positif dan perbedaan Dana Alokasi Khusus (DAK) antar sampel penelitian yang relatif jauh.

Untuk variabel Indek Pembangunan Manusia (IPM) secara keseluruhan memiliki rata-rata (*mean*) positif yaitu 81,8680. Hal ini menunjukkan 60 sampel cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut diakibatkan terjadinya kenaikan kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. Untuk Indek Pembangunan Manusia (IPM) minimum sebesar 80,23 tahun 2015. Untuk Indek Pembangunan Manusia (IPM) maximum 83,19 pada tahun 2019. Untuk standar deviasi 1,07070 menunjukkan nilai sebaran dari setiap sampel positif dan perbedaan Indek Pembangunan Manusia (IPM) antar sampel penelitian yang relatif tidak jauh.

Hasil persamaan regresi $Y = 79,750 + 0,499X_1 + 0,272X_2 + 0,254X_3$. Berdasarkan persamaan pada Tabel 2, terlihat bahwa konstanta bernilai positif 79,750 serta PAD, DAU dan DAK mempunyai pengaruh positif terhadap IPM dengan nilai koefisien regresi sebesar PAD = 0,499; DAU = 0,272 dan DAK = 0,254 artinya bahwa apabila PAD, DAU dan DAK mengalami kenaikan, maka IPM akan mengalami kenaikan juga, yang paling mendominasi pengaruhnya terhadap IPM adalah PAD.

Hasil hipotesis pertama pengaruh PAD terhadap IPM menghasilkan koefisien regresi 0,499 dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ sehingga secara parsial (individu) terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Dengan demikian

hipotesis pertama (H1): Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, diterima.

Hasil hipotesis kedua pengaruh DAU terhadap IPM menghasilkan koefisien regresi 0,272 dan tingkat signifikan $0,029 < 0,05$ sehingga secara parsial (individu) terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Dengan demikian hipotesis kedua (H2): Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, diterima

Hasil hipotesis ketiga pengaruh DAK terhadap IPM menghasilkan koefisien regresi 0,254 dan tingkat signifikan $0,027 < 0,05$ sehingga secara parsial (individu) terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3): Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, diterima

4.2. Pembahasan

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kota Semarang Periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Hasil hipotesis pertama pengaruh PAD terhadap IPM menghasilkan koefisien regresi dan tingkat signifikan sehingga secara parsial (individu) terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putra dan Ulupui (2015), Novianti (2016), Santi (2019) yang menghasilkan penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Keterkaitan teori keagenan (*agency theory*) dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah daerah (agen) dalam penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan masyarakat yang diprosikan oleh DPRD (prinsipal). Teori keagenan tersirat masyarakat sebagai prinsipal telah memberikan sumber daya kepada daerah berupa pembayaran pajak daerah, retribusi dan sebagainya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah selaku agen dalam hal ini, sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai, yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah terdiri atas pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain PAD yang sah. Salah satu tujuan utama pemerintah dalam mengelola PAD yang maksimal adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber

sumber lainnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga akan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2. Hasil hipotesis kedua pengaruh DAU terhadap IPM menghasilkan koefisien regresi dan tingkat signifikan sehingga secara parsial (individu) terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putra dan Ulupui (2015), Novarianti (2016), Santi (2019) yang menghasilkan penelitian Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Keterkaitan teori keagenan (*agency theory*) dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan (DAU) dan juga hubungan antara masyarakat yang diprosikan oleh DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen). Pemerintah pusat mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu sebagai konsekuensi dari pendelegasian wewenang tersebut, pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah baik dalam mendanai kebutuhan pemerintahan sehari-hari maupun dalam memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, teori keagenan juga tersirat dalam hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai prinsipal telah memberikan sumber daya kepada daerah berupa pembayaran pajak daerah, retribusi dan sebagainya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah selaku agen dalam hal ini, sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai, yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri.

DAU suatu Daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pemberian DAU kepada pemda merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemda. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemda, dan pemda secara leluasa dapat menggunakan DAU apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga akan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup lebih panjang, meningkatkan kualitas pendidikan dan standard kehidupan masyarakat sehingga akan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3. Hasil hipotesis ketiga pengaruh DAK terhadap IPM menghasilkan koefisien regresi dan tingkat signifikan sehingga secara parsial (individu) terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3): Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putra dan Ulupui (2015) yang menghasilkan

penelitian Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Keterkaitan teori keagenan (*agency theory*) dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan (DAK) dan juga hubungan antara masyarakat yang diproksikan oleh DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen). Pemerintah pusat mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu sebagai konsekuensi dari pendelegasian wewenang tersebut, pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah baik dalam mendanai kebutuhan pemerintahan sehari-hari maupun dalam memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, teori keagenan juga tersirat dalam hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai prinsipal telah memberikan sumber daya kepada daerah berupa pembayaran pajak daerah, retribusi dan sebagainya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah selaku agen dalam hal ini, sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai, yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menjelaskan bahwa DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk menjalankan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di kabupaten/kota. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DAK sepenuhnya digunakan untuk belanja modal untuk peningkatan fasilitas publik dengan kata lain tidak ada bagian DAK yang digunakan untuk biaya operasional pembangunan seperti biaya perjalanan dinas dan sebagainya. Dengan meningkatnya DAK, maka akan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

5. Simpulan

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia..
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusin.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

6. Implikasi Manajerial

1. Variabel PAD mempunyai pengaruh terbesar terhadap IPM dilihat dari koefisien regresinya, oleh sebab itu Pemerintah Kota Semarang perlu mempertahankan bahkan meningkatkan PAD pada setiap tahunnya

2. Variabel DAU juga mempunyai pengaruh terhadap IPM dilihat dari koefisien regresinya, oleh sebab itu Pemerintah Kota Semarang perlu meningkatkan DAU pada setiap tahunnya
3. Variabel DAK mempunyai pengaruh terkecil terhadap IPM dilihat dari koefisien regresinya, oleh sebab itu Pemerintah Kota Semarang perlu meningkatkan DAK pada setiap tahunnya

7. Keterbatasan dan Penelitian Mendatang

- 1) Pada penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independent, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
- 2) Sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan data bulanan Kota Semarang.
- 3) Periode penelitian yang dilakukan ini terbatas hanya menggunakan 5 periode pada tahun 2015-2019

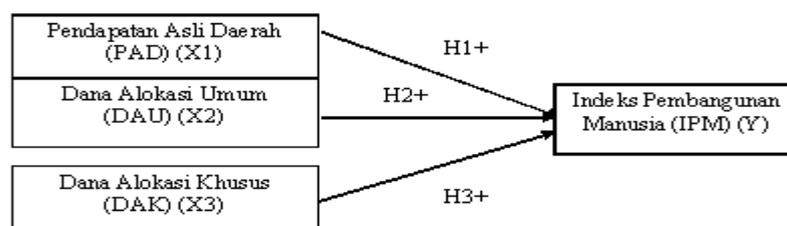
Referensi

- Ardhani, Pungky. 2011. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.” *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2020,.Kota Semarang
- Badan Pemeriksaan Keuangan. 2020. Kota Semarang
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 2015. *Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang*.
- Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik. 2015. *Indeks Pembangunan Manusia*.
- Fadhly, Zul. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*
- Fauzyny, Wulan. 2013. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2011.” *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta*.
- Ghozali, Imam. 2016.*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi V. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Halim, Abdul. 2007. “*Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*.” Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Riva Ubar. 2017. “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara.” *Jurnal Riset Akuntans dan Bisnis*. Volume 1.No. 1.Hal. 118 – 130.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2009. “Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen”. Edisi Pertama BPFE, Yogyakarta.
- Khusaini, Mohammad. 2006. “Ekonomi Publik Desentralisasi Fiscal dan Pembangunan Daerah.” Padang : BFE UNIBRAW
- Mardiasmo. 2012. “*Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*.” Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat
- Marhaeni, Harmawanti; Sri Yati dan Bambang Tribudhi M. 2008. “*Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2006-2007*.” Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- Novarianti, Nina. 2016. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemediiasi Pada Kabupaten/Kota di Indonesia 2010-2013” *Jurnal Pascasarjana Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung*
- Santi, Nova Yurista. 2019. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Studi Empiris pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2017)” *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta*
- Putra, Putu Gde M dan Ulupui,I Gusti Ketut A. 2015. “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 11.3 (2015) : 863-877*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- Rahman. 2016. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Jeneponto (Perspektif Ekonomi Islam)” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Makassar*
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: penerbit Alfabeta.
- Usman, Syaikhu., Mawardi,M. Sulton., Poesoro,Adri., Suryahadi,Asep., Sampford,Charles. 2008. “Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK).” Laporan Penelitian SMERU.
- UNDP. 1990. *Human Development Report 1990*. New York : Oxford University Press.
- UNDP. 2004. *Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia*. <http://www.undp.or.id>, diakses pada tanggal 20 November 2014
- UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Yusuf, Noor Andi Fakhruddin. 2014. Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta”. *Jurnal. Fak. Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang*.

Lampiran

Gambar 1. Model Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia



Tabel: 1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	60	62064188630	342121300130	139545198862,62	60094754161,898
DAU	60	0	204325456000	100618106250,00	43929288200,201
DAK	60	0	95495829706	20054382463,65	25666688803,234
IPM	60	80,23	83,19	81,8680	1,07070
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Tabel 2
Hasil uji regresi pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap IPM

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	79,750	,511		156,132	,000
PAD	8,885E-12	,000	,499	4,122	,000
DAU	6,621E-12	,000	,272	2,247	,029
DAK	1,058E-11	,000	,254	2,267	,027

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022